

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri manufaktur memiliki peranan penting dalam usaha pemerintah menggenjot nilai investasi dan ekspor sehingga mampu menjadi akselerasi pertumbuhan ekonomi negara. Indonesia sebagai negara yang diberkati dengan sumber daya yang melimpah memiliki peluang yang besar untuk mengembangkan sektor industri manufakturnya dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjadi basis manufaktur dunia. Saat ini, sektor manufaktur memberikan kontribusi sebesar 19% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia (Fauzan, 2022). Angka tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sudah mulai melebarkan sayapnya dalam sektor manufaktur, baik dalam sektor makanan dan minuman, sektor tekstil dan pakaian, sektor otomotif, sektor kimia, dan sektor elektronika, serta sektor minyak dan gas. Hal ini terlihat dari jumlah perusahaan industri manufaktur skala menengah dan besar di Indonesia yang mencapai 29 ribu perusahaan (BPS, 2022).

Perusahaan manufaktur sebagai perusahaan yang berkecimpung dalam pengolahan bahan baku menjadi barang jadi yang siap dijual tentu memiliki banyak tugas yang harus dilakukan untuk memastikan kelancaran proses produksi dan kelangsungan hidup perusahaan. Proses produksi yang dilakukan tentunya melalui banyak tahapan dan melibatkan banyak pihak. Artinya, tidak sedikit pula kegiatan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan kegiatan produksi perusahaan terus berjalan dengan baik. Agar operasional perusahaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka perusahaan harus mencatat dan mengklasifikasi seluruh transaksi yang dilakukan dengan rapi, baik, dan sesuai. Selain itu, pencatatan juga diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengukur kinerja perusahaan dan membuat perencanaan keuangan bagi operasional perusahaan. Oleh sebab itu, transaksi yang dicatat harus melalui proses pemeriksaan untuk memastikan bahwa catatan transaksi tersebut telah tercatat sesuai dengan PSAK dan peraturan yang berlaku di perusahaan.

Hal ini berlaku terutama bagi perusahaan manufaktur skala besar. Perusahaan manufaktur berskala besar tentunya melakukan kerjasama dan transaksi dengan banyak vendor dan *customer* sehingga transaksi yang harus di-*input* pun jumlahnya tidak sedikit. Semakin besar jumlah transaksi, maka dibutuhkan pemeriksaan yang semakin intensif untuk memperkecil kemungkinan *error* dalam pencatatannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai analisis pemeriksaan jurnal transaksi untuk mengetahui efektivitas *internal control* dari salah satu perusahaan manufaktur terbesar di Indonesia yaitu PT Samator Surabaya.

1.2 Permasalahan

1. Bagaimana efektivitas *internal control* pada Divisi Akuntansi PT Samator Surabaya?
2. Apa yang menjadi kendala dalam proses pemeriksaan jurnal transaksi?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas *internal control* pada Divisi Akuntansi PT Samator.
2. Mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam proses pemeriksaan jurnal transaksi.

1.4 Kerangka Teori

1.4.1 Internal Control (Pengendalian Internal)

Pengendalian internal menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)* pada *Internal Control Intergrated Framework (ICIF)* yang diterbitkan tahun 2013 didefinisikan sebagai suatu proses yang mendapat pengaruh dari dewan direksi, manajemen, dan personil lainnya terhadap untuk menjamin tercapainya tujuan perusahaan baik melalui efektifitas dan efisiensi operasi, penyajian laporan keuangan yang terpercaya, maupun ketaatan terhadap undang-undang (UU) dan peraturan yang berlaku

Menurut Mulyadi (2017) sistem pengendalian internal termasuk didalamnya yaitu struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, memeriksa ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (2011), sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan entitas lain yang dirancang untuk menyuguhkan keyakinan memadai mengenai pencapaian dalam keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Melalui berbagai pengertian diatas, pengendalian internal dapat diartikan secara umum sebagai sebuah proses yang dilakukan perusahaan untuk menghindari risiko dan memberikan jaminan bagi investor dalam mencegah terjadinya *fraud* di perusahaan.

1.4.1.1 Komponen Pengendalian Internal

Menurut *Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO)* (2013), sistem pengendalian internal memiliki 5 komponen utama sebagai berikut:

1) Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan serangkaian standar, prosedur, dan struktur yang menjadi dasar dari seluruh pengendalian internal perusahaan. Dewan direksi dan manajemen senior bertanggung jawab menetapkan dengan jelas nilai-nilai integritas dan kegiatan tidak etis yang tidak dapat ditoleransi.

Lima prinsip Lingkungan Pengendalian:

1. Perusahaan menunjukkan komitmen atas integritas dan nilai-nilai etis.
2. Dewan direksi menunjukkan independensi dari manajemen dan mengawasi perkembangan dan performa pengendalian internal.

3. Manajemen dengan pengawasan dewan direksi menetapkan struktur, garis pelaporan, dan otoritas serta tanggung jawab yang sesuai dengan masing-masing tujuan.
4. Perusahaan menunjukkan komitmennya untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang berkompeten dan sesuai dengan tujuan perusahaan.
5. Perusahaan memberikan individu tanggung jawab atas pengendalian internal masing-masing.

2) Penaksiran Resiko

Perusahaan harus mampu mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mampu menyebabkan munculnya resiko bisnis dan harus menentukan bagaimana caranya mengelola resiko tersebut.

Empat prinsip penaksiran risiko:

1. Perusahaan menetapkan tujuan secara spesifik sehingga perusahaan mampu mengidentifikasi dan menilai risiko terkait tujuan tersebut.
2. Perusahaan mengidentifikasi risiko atas pencapaian tujuan dan menganalisis risiko tersebut sebagai dasar untuk menentukan pengelolaan risiko.
3. Perusahaan mempertimbangkan potensi *fraud* dalam penilaian risiko.
4. Organisasi mengidentifikasi dan menilai segala perubahan yang mampu berdampak terhadap sistem pengendalian internal.

3) Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan suatu tindakan dimana manajemen harus merancang kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi resiko yang mampu menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Komponen pengendalian:

1. Pemberian otorisasi atas transaksi dan kegiatan
2. Pembagian tugas dan tanggung jawab
3. Rancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang baik
4. Perlindungan yang cukup terhadap kekayaan dan catatan perusahaan
5. Pemeriksaan terhadap kinerja perusahaan

- 4) Informasi dan Komunikasi
Sistem pengendalian internal harus dikomunikasikan dan diinfokan kepada seluruh karyawan.
- 5) Pemantauan
Sistem pengendalian internal harus dipantau secara berkala. Segala kekurangan signifikan harus segera dilaporkan kepada manajemen puncak dan dewan komisaris.

1.4.2 Pemeriksaan Jurnal Transaksi

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 545/KMK.05/2000 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, pemeriksaan didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Setiadi (2019), pemeriksaan akuntansi merupakan suatu proses pengujian untuk membuktikan dan memastikan bahwa pos-pos Laporan Posisi Keuangan/Neraca dan rekening-rekening yang terdapat didalamnya dan pos-pos laba rugi adalah benar dan didukung oleh dokumen-dokumen yang berkaitan sebagai Kertas Kerja Audit.

Jurnal transaksi adalah catatan yang berisi data transaksi keuangan yang didalamnya meliputi seluruh pemasukan dan pengeluaran yang terjadi dalam suatu bisnis. Pemeriksaan terhadap jurnal transaksi yang dilakukan oleh internal perusahaan diperlukan untuk memastikan tidak adanya kecurangan dan kesalahan dalam transaksi dan operasional yang dijalankan oleh perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang penulisan, permasalahan, tujuan penulisan, kerangka teori, dan sistematika penulisan berkaitan dengan Efektivitas Proses Pemeriksaan Jurnal Transaksi Pada Divisi Akuntansi PT Samator.

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini akan menguraikan mengenai sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, dan manajemen dari PT Samator Surabaya sebagai objek penulisan laporan ini.

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjabarkan berbagai hal yang berkaitan dengan Efektivitas Proses Pemeriksaan Jurnal Transaksi Pada Divisi Akuntansi PT Samator dan analisis kelemahan dan kelebihan dari topik tersebut.

BAB IV PENUTUP

Bab ini akan berisikan kesimpulan dan saran sebagai hasil dari analisis Efektivitas Proses Pemeriksaan Jurnal Transaksi Pada Divisi Akuntansi PT Samator.